



Pantai Citepus Palabuhanratu – Kab. Sukabumi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH (LKIP PD) TAHUN 2020

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2020



(0266) 436 428



blh@sukabumikab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi tahun 2020 ini dengan baik dan lancar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam hakikatnya perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelola sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah (PD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021.

Dalam yuridis formal dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelola dan penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan LKIP DLH ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala daya dan upaya kita. Amin.

Palabuhanratu, Desember 2020
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKABUMI**

Ir. Hj. DEDAH HERLINA, M.Si
NIP. 19630711 198809 2 001



IKHTISAR EKSKUTIF

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Visi Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 Yaitu “*TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN MANDIRI*”, Misi ke-4 Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 yang menjadi acuan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yaitu “*Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah*”, serta 5 (Lima) Program Prioritas (Janji) Bupati Sukabumi Periode Tahun 2016-2021 menuju “*Sukabumi Lebih Baik*”, terutama yang berkenaan dengan lingkungan yaitu “*Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Sukabumi Menjadi Destinasi Wisata Dunia Dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Yang Berwawasan Lingkungan*” salah satunya melalui “*Pelaksanaan Sukabumi Go Green*”.

Misi ke- 4 tersebut merupakan kebijakan yang terkait dengan urusan lingkungan hidup, dengan program urusan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase



RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 sebagai turunannya telah menetapkan target kinerja yang harus dipenuhi oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020. Berikut ini target kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung Target Kinerja Kabupaten Sukabumi Tahun 2020:

Indeks Kualitas Air (IKA)	Target : 60,00 Poin	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Target : 57,10 Poin
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Target : 75 Poin		
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Target : 41,5 Poin		

Dalam upaya mencapai target tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dihadapkan dengan *Complexibility* (kompleksitas masalah) yang timbul didalam pengelolaan lingkungan antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM pada Dinas Lingkungan hidup sehingga personil yang ada harus betul-betul memaksimalkan tenaga dan potensi yang ada dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, serta mencoba mengusulkan tenaga baru/atau personil baru yang memiliki kemampuan di bidang lingkungan hidup
2. Luasan wilayah pun menjadi kendala dalam pengelolaan lingkungan hidup akibat kurangnya Sarana, Prasarana, Anggaran, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi membentuk kader Lingkungan yang pada akhirnya para kader ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh pada masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.
3. Kepatuhan terhadap hukum serta tingkat kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup kurang, baik masyarakat, para pengusaha, ataupun stakeholders lainnya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi harus terus menerus



melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan mensosialisasikan hukum - hukum atau peraturan - peraturan yang berkaitan dengan hukum lingkungan.

Walaupun secara internal dan eksternal dihadapkan dengan beberapa masalah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi tetap perlu mengusahakan budaya kerja yang cepat tanggap (*responsive*) dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dapat mendukung dan memenuhi pencapaian kinerja IKLH tahun 2020 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra DLH Tahun 2016-2021, yaitu sebesar 63,91 Poin dari target sebesar 57,10 Poin atau ketercapaiannya dalam persentase sebesar 111,92%. Pencapaian target tersebut meningkat dari pencapaian kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 57,93 Poin.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Isu Strategis	2
1.5. Struktur Organisasi	4
1.6. Landasan Hukum	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	9
2.2. Perjanjian Kerja Tahun 2020	22
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2020	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	

BAB I



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap dinas Perangkat Daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Perangkat Daerah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis mengandung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Atas dasar hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun



2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP PD) tahun 2020 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya

1.3. Isu Strategis

Dalam rangka mengantisipasi dinamika, perubahan dan tantangan ke depan pembangunan di Kabupaten Sukabumi maka DLH Kabupaten Sukabumi dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting dalam menentukan visi-misi dan strategi yang digunakan dalam sebagai upaya mendukung tercapainya visi-misi pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021.

Dengan menggunakan metoda FGD dan pembobotan didapat isu strategis sebagai berikut:

1. Belum efektifnya peran DLH sebagai leading sektor dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan berwawasan lingkungan antar sektor dan antar fungsi baik internal maupun eksternal;
2. Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan lingkungan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah;



3. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM DLH dan sarana prasarananya;
4. Masih rendahnya kepedulian stakeholders (aparatur, masyarakat, dll) terhadap kondisi lingkungan hidup;
5. Masih tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terutama di sungai utama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Sukabumi;
6. Belum sinkronnya antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
7. Belum terbangunnya budaya organisasi yang berorientasi hasil dan mampu menghadapi tantangan dan perubahan ke depan;
8. Belum tersedianya data yang berkualitas;
9. Belum efektifnya sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagai dasar bagi perumusan kebijakan lingkungan daerah;
10. Sulitnya mendapatkan lahan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS);
11. Belum terselenggaranya program pengurangan sampah di sumbernya;
12. Pengelolaan sampah melalui penerapan 3R (*Reuse, Reduce dan Recycling*).

Isu Strategis lingkungan di Kabupaten Sukabumi kaitannya dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan diantaranya sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - o Kerusakan hutan lindung dan kawasan lindung sehingga berpotensi terjadinya erosi, sedimentasi
 - o Berkurangnya spesies dilindungi (flora dan fauna)
 - o Pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga (sampah, sabun, deterjen, tinja, bahan kimia)
 - o Pencemaran sungai oleh pabrik dan kegiatan usaha lainnya
 - o Pencemaran tanah dan sungai oleh pestisida dan pupuk (pertanian dan perkebunan)
 - o Pencemaran bahan berbahaya dan beracun (oli bekas, limbah accu, batre, lampu merkuri, limbah medis)



- o Pencemaran udara oleh sumber bergerak dan tak bergerak
 - o Dampak dari perubahan iklim regional dan global
 - o Pencemaran dan kerusakan habitat pesisir dan laut
- b. Berkaitan dengan perlindungan, rehabilitasi, dan konservasi sumber daya alam
- o Kerusakan dan pencemaran akibat penambangan
 - o Semakin meningkatnya eksploitasi air tanah untuk industri dan domestik
 - o Kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati wilayah pesisir dan laut
- c. Berkaitan dengan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan drainase
- o Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan;
 - o Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mengelola sampah;
 - o Kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, baik secara teknis maupun nonteknis;
 - o Penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan baru untuk TPPAS/TPS;
 - o Perubahan lingkungan sosial di kawasan TPPAS.

Kondisi seperti di atas bukan hanya mempunyai dampak terhadap lingkungan fisik seperti hilangnya sumberdaya hutan, pencemaran air dan udara, tetapi juga akan mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Kemerostan fungsi-fungsi ekologi di Kabupaten Sukabumi terutama pada hutan alam bisa menyebabkan konsekuensi yang serius terhadap berbagai kegiatan ekonomi dari masyarakat setempat maupun industri.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018** tentang **Perubahan Atas Peraturan Daerah**



Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

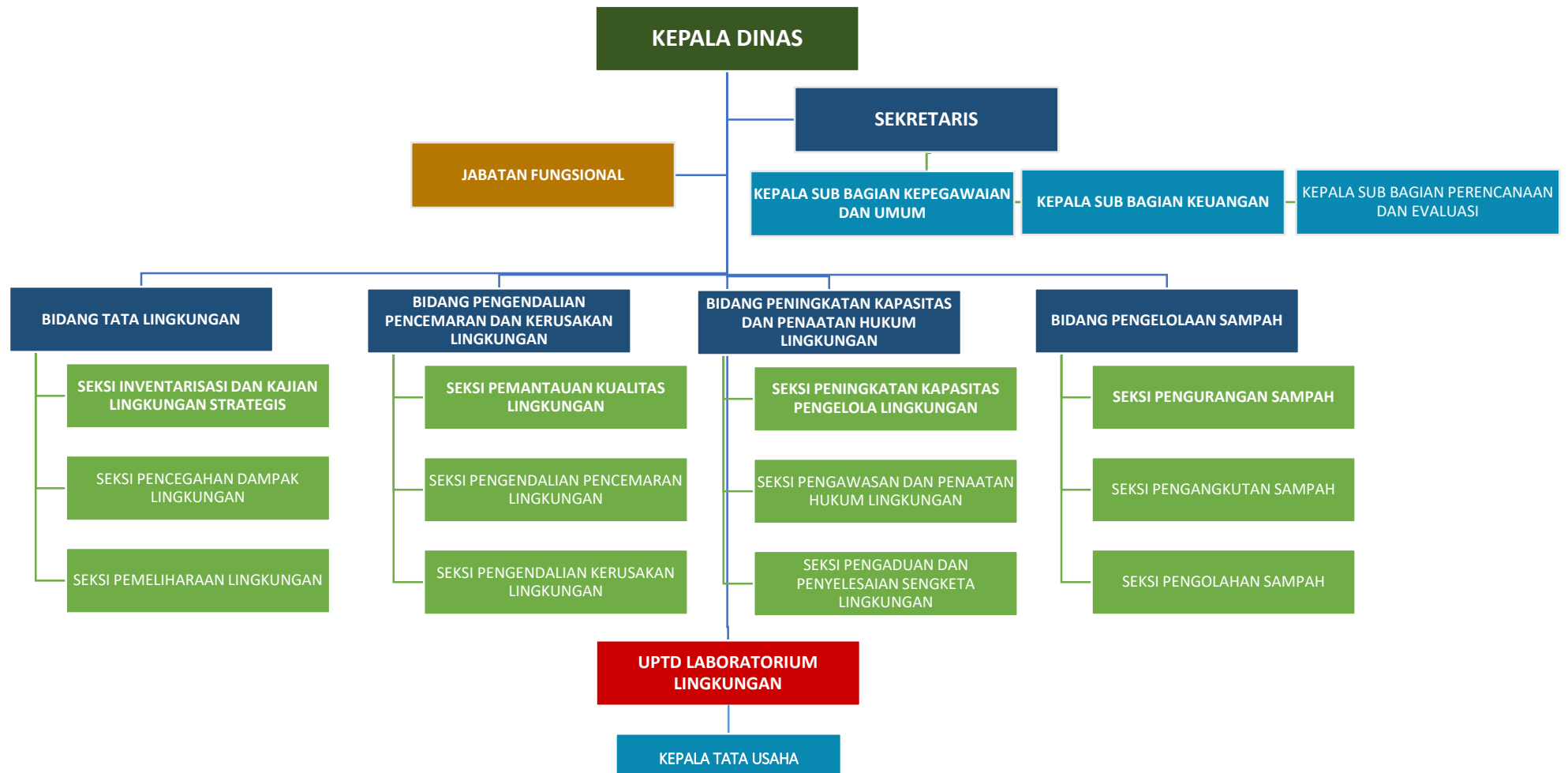
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan; tata lingkungan; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. penerbitan izin/rekomendasi di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Dinas;
- e. penerbitan rekomendasi/pengesahan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, IPPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara untuk penerbitan perizinan oleh perangkat daerah terkait;
- f. pembinaan UPTD di lingkungan dinas;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan Dinas dan perangkat daerah terkait;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Perbup SOTK No. 118 Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.1, terdiri dari:



- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Kajian Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam
- e. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan
 - 3. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- f. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengurangan Sampah
 - 2. Seksi Pengangkutan Sampah
 - 3. Seksi Pengolahan Sampah
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi



1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 disusun dengan merujuk pada landasan hukum Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

BAB II



PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 berupaya mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 tahap ketiga, yaitu Pembangunan Sarana Pemerintahan, Penataan Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan amanat pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, Dinas Lingkungan Hidup berupaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati untuk periode pembangunan 2016-2021.

Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021).

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI
YANG RELIGIUS DAN MANDIRI”**

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan
Kabupaten Sukabumi



Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (the chosen track) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholders pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;**
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;**



- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan**
- 4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.**

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan**

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kabupaten Sukabumi harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan

secara merata di Kabupaten Sukabumi baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Kabupaten Sukabumi yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah. Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan social maupun kultural daerah.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:

- 1) Tidak ada korupsi
- 2) Tidak ada pelanggaran hukum
- 3) Tata kelola keuangan yang baik
- 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
- 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap
- 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik
- 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif
- 8) Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah
- 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.



Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat.

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang harus terpenuhi sebagai bagian dari kebutuhan primer. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu dan jumlah tenaga kependidikan yang baik pula sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hidup sehat merupakan salah satu hak dan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal harus ditunjang dengan prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang ada. Dengan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang mencukupi akan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, untuk lebih meningkatkan mutu hidup sehat atau kesehatan perlu diperhatikan pula kesejahteraan para medis agar memberi motivasi lebih dalam peningkatan pelayanan mutu hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kota dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemerataan pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal. Secara harfiah, pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses terjangkau dan merata bagi semua. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam system pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.



2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Sebagai manifestasi terhadap upaya pencapaian Visi Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 yaitu “*TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN MANDIRI*”, Misi ke-4 Bupati Sukabumi Periode 2016-2021 yang menjadi acuan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yaitu pada Misi “*Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah*”, serta 5 (Lima) Program Prioritas (Janji) Bupati Sukabumi Periode Tahun 2016-2021 menuju “*Sukabumi Lebih Baik*”, terutama yang berkenaan dengan lingkungan yaitu “*Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Sukabumi Menjadi Destinasi Wisata Dunia Dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Yang Berwawasan Lingkungan*” salah satunya melalui “*Pelaksanaan Sukabumi Go Green*”. Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati

b. Sasaran

1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati
3. Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir

Selanjutnya untuk tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 bisa dilihat di bawah ini:

Tabel. 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Periode 2016-2021

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
								1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Jumlah Pencemaran Air Sungai	26 sungai	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	38	12	12	12	12	12	12
		Menurunnya Jumlah Pencemaran	10 titik		Jumlah Masyarakat, Lembaga/			Naskah MoU	Belum ada naskah MoU	10	10	10	10



No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
								1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Udara			Kelompok Masyarakat, Stakeholders dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup								
					Menurunnya Jumlah Pencemaran Air Sungai	Sungai	5	3	4	4	5	5	5
					Menurunnya Jumlah Pencemaran Udara	Titik	10	10	10	10	10	10	10
					Tertanganinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Izin	100	100	100	100	100	100	100
					Menurunnya Pencemaran Akibat Limbah B3 dan Sampah	%	50	50	52	54	56	58	60
2	Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tutupan Lahan (Vegetasi)	61 %	Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tutupan Lahan (Vegetasi)	%	51	51	53	55	57	59	61
					Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	%	Belum ada pengelolaan Taman Kehati	0	5	5	10	10	10
				Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir	%	40	40	42	44	46	48	50

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah tersebut mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, pada Tanggal 2 Mei 2019. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Bupati untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah **“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”**. Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

b. Sasaran

1. Meningkatkan Kualitas Air
2. Meningkatkan Kualitas Udara
3. Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan



4. Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
Berikut ini tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yang telah mengalami penyesuaian dengan Revisi IKU Kepala Daerah:

Tabel. 2.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Periode 2016-2021

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
								1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)	53,75-57,75	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	49.20	55.50	56.00	56.50	59.50	60.00	60.50
				Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	69.09	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00
				Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	40.77	39.50	40.00	40.50	41.00	41.50	42.00
				Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	%	16.40	20.40	24.40	28.40	32.40	36.40	50.40



Tujuan dan sasaran tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dengan program dan kegiatan sebagai pelaksanaannya. Untuk menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan dituangkan dalam pohon kinerja berikut ini:

**CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 TAHUN 2020**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
TUJUAN : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
INDIKATOR : INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SASARAN			
1. Meningkatnya Kualitas Air 2. Meningkatnya Kualitas Udara 3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan 4. Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman			
INDIKATOR			
1.1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2.1. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3.1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 4.1. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani			
BIDANG TATA LINGKUNGAN	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH
SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN
1.1. Meningkatnya penataan lingkungan	2.1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	3.1. Meningkatnya kapasitas dan penataan hukum lingkungan	4.1. Meningkatnya pengelolaan sampah
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1.1.1. Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun	2.1.1. Persentase air sesuai baku mutu pada 15 titik (5 sungai)	3.1.1. Cakupan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	4.1.1. Persentase pengurangan sampah perkotaan
1.1.2. Persentase dokumen evaluasi lingkungan hidup tersusun	2.1.2. Persentase usaha/kegiatan mengelola B3 dan limbah B3	3.1.2. Persentase ketaatan usaha/kegiatan	4.1.2. Persentase pengangkutan sampah
1.1.3. Persentase penerapan dokumen lingkungan usaha/kegiatan	2.1.3. Persentase udara sesuai baku mutu pada 10 titik	3.1.3. Persentase penanganan kasus lingkungan	4.1.3. Persentase pengoperasian TPA



1.1.4. Persentase dokumen perencanaan pemeliharaan lingkungan			2.1.4. Persentase tingkat tutupan vegetasi								
1.1.5. Persentase lokasi kampung iklim											
Kasi Inventarisasi Dan Kajian Lingkungan Strategis	Kasi Pencegahan Dampak Lingkungan	Kasi Pemeliharaan Lingkungan	Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Kasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan	Kasi Pengawasan Dan Penataan Hukum Lingkungan	Kasi Penanganan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Kasi Pengurangan Sampah	Kasi Pengangkutan Sampah	Kasi Pengolahan Sampah
SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN
1.1.1.1. Meningkatkan inventarisasi dan kajian lingkungan strategis	1.1.2. Meningkatkan pencegahan dampak lingkungan	1.1.3. Meningkatkan pemeliharaan lingkungan	2.1.1.1. Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan	2.1.2. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan	2.1.3. Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan	3.1.1.1. Meningkatkan kapasitas pengelola lingkungan	3.1.2. Meningkatkan pengawasan dan penataan hukum lingkungan	3.1.3. Meningkatkan penanganan dan penyelesaian sengketa lingkungan	4.1.1.1. Meningkatkan pengurangan sampah	4.1.2.1. Meningkatkan pengangkutan sampah	4.1.3.1. Meningkatkan pengolahan sampah
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1.1.1.1. Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	1.1.2.1. Jumlah dokumen lingkungan usaha/kegiatan yang dikelola	1.1.3.1. Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan lingkungan	2.1.1.1. Jumlah lokasi/titik pemantauan kualitas air sungai	2.1.2.1. Jumlah dokumen identifikasi sumber pencemaran air sungai	2.1.3.1. Jumlah data kerusakan lingkungan	3.1.1.1. Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	3.1.2.1. Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	3.1.3.1. Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang ditangani	4.1.1.1. Jumlah TPA dengan Control Landfill	4.1.2.1. Jumlah sampah terangkut	4.1.3.1. Jumlah sampah yang dikelola
1.1.1.2. Jumlah dokumen evaluasi lingkungan hidup	1.1.2.2. Jumlah anggota komisi amdal mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	1.1.3.2. Jumlah lokasi kampung iklim	2.1.1.2. Jumlah lokasi/titik pemantauan kualitas udara ambien	2.1.2.2. Jumlah usaha/kegiatan mengelola B3 dan limbah B3		3.1.1.2. Jumlah sekolah berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	3.1.2.2. Jumlah usaha/kegiatan taat terhadap hukum lingkungan		4.1.1.2. Jumlah bank sampah	4.1.2.2. Jumlah sarana dan prasarana angkutan sampah	4.1.3.2. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan



		2.1.2.3. Jumlah dokumen identifikasi sumber pencemaran udara ambien		4.1.1.3. Jumlah TPS3R	4.1.2.3. Kajian jalur pelayanan persampahan 4.1.2.4. Jumlah sarana dan prasarana sampah yang dipelihara	4.1.3.3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
SEKRETARIAT						
SASARAN						
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	3. Meningkatnya disiplin Aparatur	4. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	5. Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
INDIKATOR						
1.1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran	2.1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	3.1. Persentase tingkat disiplin aparatur	4.1. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5.1. Cakupan pengelolaan laporan perangkat daerah		
Subag Umum Dan Kepegawaian			Subag Keuangan		Subag Perencanaan Dan Evaluasi	
1.1.1. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dikelola	2.1.1. Jumlah sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	3.1.1. Jumlah aparatur hadir tepat waktu, berseragam dan beratribut lengkap	4.1.1. Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	5.1.1.a. Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan keuangan yang disusun 5.1.1.b. Jumlah laporan keuangan yang disusun	5.1.2.a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun 5.1.2.b. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	

Dalam rangka menajamkan dan memudahkan evaluasi dalam proses pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2020, disusun target per triwulan sebagai bentuk rencana aksi yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja
Per Triwulan Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET			
				Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	60.00	Indeks	0	0	0	60.00
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75.00	Indeks	0	0	0	75.00
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	41.50	Indeks	0	0	0	41.50
Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	36.40	%	0	0	0	36.40

2.1.3. Strategi, Kebijakan, dan Program

Guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan, diperlukan strategi sebagai berikut:

Tujuan – Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

- Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Meningkatkan Perlindungan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman

Dalam rangka penguatan strategi, diperlukan dukungan kebijakan yang akan menjadi pendorong kelancaran dan keterpaduan pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, diantaranya:

- Kebijakan 1 - Identifikasi sumber dan penanganan pencemaran air, udara, sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun dari usaha/kegiatan
- Kebijakan 2 - Penanganan pengaduan lingkungan hidup, Pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH), pengembangan PPNS/PPLH, Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum/perda



- Kebijakan 3 - Pembinaan dan peningkatkan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Kebijakan 4 - Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terkoordinasi; melakukan inventarisasi GRK secara berkesinambungan; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait perubahan iklim
- Kebijakan 5 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetik
- Kebijakan 6 - Melakukan inventarisasi, assessment (penilaian), dan secara terkoordinasi melakukan pemulihan, rehabilitasi, pesisir yang rusak
- Kebijakan 7 - Peningkatan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan
- Kebijakan 8 - Peningkatan cakupan pelayanan persampahan
- Kebijakan 9 - Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan



No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Cukup Jelas	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Identifikasi sumber dan penanganan pencemaran air, udara, sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun dari usaha/kegiatan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Cukup Jelas		Penanganan pengaduan lingkungan hidup, Pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH), pengembangan PPNS/PPLH, Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum/perda	
							Pembinaan dan peningkatkan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup	
			Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Vegetasi (Lahan)	Cukup Jelas	Meningkatkan Perlindungan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terkoordinasi; melakukan inventarisasi GRK secara berkesinambungan; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait perubahan iklim	Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetik				
			Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	Cukup Jelas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
						Peningkatan cakupan pelayanan persampahan		
							Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan	



Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut menjadi dasar dalam penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2016-2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	TARGET KINERJA						Kondisi Kinerja Akhir Periode
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Cukup jelas	Indeks	49.20	55.50	56.00	56.50	59.50	60.00	60.50	60.50
	Meningkatnya Kualitas Udara		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Cukup jelas	Indeks	69.09	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00	76.00
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Cukup jelas	Indeks	40.77	39.50	40.00	40.50	41.00	41.50	42.00	42.00
	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	Cukup jelas	%	16.40	20.40	24.40	28.40	32.40	36.40	50.40	50.40



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Menurut PERMENPAN-RB Tahun 2014 (Lampiran 1), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB nomor 53 Tahun 2014 (lampiran I) adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2020, maka target kinerja utama yang diperjanjikan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel. 2.4. Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2020
Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	60.00 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75.00 Poin
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	41.50 Poin
4	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	36.40%

Tabel. 2.5. Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kualitas air	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun	100%
		Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	1 dokumen
		Persentase dokumen evaluasi lingkungan hidup tersusun	100%
		Jumlah dokumen evaluasi lingkungan hidup	3 dokumen
		Persentase penerapan dokumen lingkungan usaha/kegiatan	100%
		Jumlah dokumen lingkungan usaha/kegiatan yang dikelola	100 rektek
		Persentase air sesuai baku mutu pada 15 titik (5 sungai)	100 %
		Jumlah lokasi/titik pemantauan kualitas air sungai	15 titik (5 sungai)
		Jumlah dokumen identifikasi sumber pencemaran air sungai	1 dokumen
		Sarana prasarana pengujian kualitas air	6 unit/set
		Persentase usaha/kegiatan mengelola B3 dan limbah B3	100 %
		Jumlah usaha/kegiatan mengelola B3 dan limbah B3	10 usaha/kegiatan
		Persentase ketaatan usaha/kegiatan	100 %
		Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	50 usaha/kegiatan
Jumlah usaha/kegiatan taat terhadap hukum lingkungan	40 usaha/kegiatan		



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target
		Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan	90 %
		Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang ditangani	30 pengaduan
2	Meningkatnya kualitas udara	Persentase udara sesuai baku mutu pada 10 titik	100 %
		Jumlah lokasi/titik pemantauan kualitas udara ambien	10 titik
		Jumlah dokumen identifikasi sumber pencemaran udara ambien	1 dokumen
		Cakupan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	100 %
		Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	567 orang
		Jumlah sekolah berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	9 sekolah
3	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Persentase dokumen perencanaan pemeliharaan lingkungan	100 %
		Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan lingkungan	1 dokumen
		Persentase lokasi kampung iklim	100 %
		Jumlah lokasi kampung iklim	5 kp/ dusun
		Persentase tingkat tutupan vegetasi	100 %
Jumlah data kerusakan lingkungan	35 kecamatan		
4	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase pengurangan sampah perkotaan	12 %
		Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah	381 orang
		Persentase pengangkutan sampah	24,4 %
		Jumlah sampah terangkut	510 m3
		Jumlah sarana dan prasarana angkutan sampah	64 unit
		Jumlah sarana dan prasarana angkutan sampah yang dipelihara	64 unit
		Persentase pengoperasian TPA	40 %
		Jumlah sampah yang dikelola	761 m3
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	205 unit		
Jumlah TPA dengan Control Landfill	2 lokasi		

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2020

Urusan Lingkungan Hidup mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Wajib yang tidak



berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan alokasi anggaran belanja langsung yang disediakan sebesar Rp. 26.443.475.095,-. Pada tahun 2020 Pencapaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diwujudkan melalui Kebijakan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah, yang meliputi 3 (tiga) program utama dan 3 (tiga) program penunjang (rutin), yaitu :

Program Utama:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari 15 kegiatan
2. Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari 5 kegiatan
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase, terdiri dari 7 kegiatan

Program Penunjang (Rutin):

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 1 kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 8 kegiatan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 5 kegiatan



Tabel. 2.6. Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020
Dinas Lingkungan Hidup

MISI: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	60,00	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	485.216.000
					Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan	52.010.000
					Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	36.630.000
					Penerapan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	32.450.000
					Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan Tahun 2020)	0
					Pengendalian Pencemaran Air	11.220.000
					Pemantauan Kualitas Air	99.865.000
					Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	223.331.000
					Pembinaan Teknis Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL	22.240.000
					Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah B3	2.770.000
					Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	4.700.000
	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	75	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	80.945.000
					Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh/Adipura	0
				Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)	25.720.000	
				Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan Hidup dan Stakeholders	0	
				Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Wilayah Kab. Sukabumi	50.725.000	
				Pengendalian Pencemaran Udara	4.500.000	



MISI: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	41,50	Program Perlindungan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam	286.690.000
					Penyusunan dan Kajian Profil Lingkungan Hidup	220.000.000
					Program Kampung Iklim di Level Daerah	34.020.000
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sukabumi	2.740.000
					Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	9.120.000
					Pengelolaan Pesisir Terpadu	20.810.000
	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	%	36,40	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	21.108.910.300
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3.070.000
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.245.720.000
					Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	14.247.051.300
					Penilaian K3	0
					Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan	0
					Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan (Hutang Tahun 2019)	1.160.412.000
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Hutang Tahun 2019)	4.452.657.000



Tabel. 2.7. Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Anggaran Tahun 2020
Dinas Lingkungan Hidup


MISI: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	60,00	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	485.216.000
	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	75,00	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	80.945.000
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	41,50	Program Perlindungan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam	286.690.000
	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	%	36,40	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	21.108.910.300

Tabel. 2.8. Program dan Anggaran Tahun 2020
Dinas Lingkungan Hidup

Program	Anggaran (Rp)	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.824.000.000	566.161.000
2. Program Perlindungan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumber Daya Alam	744.000.000	286.690.000
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	19.635.000.000	21.108.910.300



BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, Perangkat Daerah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah).

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan terdiri dari indikator-indikator:



- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; dan
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak diukur pada periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan Dinas. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

Cara perhitungan indikator kinerja terdapat pada Lampiran 2 prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu juga memperhatikan karakteristik komponen realisasi dengan melihat kepada kondisi tertentu. Kondisi tersebut, yaitu:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Indikator untuk kondisi (1) atau (2) sejatinya dapat dilihat langsung pada Lampiran 2. Sebagian besar indikator Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, yaitu terdapat pada kondisi (1).

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian indikator kinerja dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Skala Penilaian

No.	Skala Nilai	Kategori Penilaian
1.	> 100	Sangat Baik
2.	> 80 – 100	Baik
3.	> 55 – 80	Sedang
4.	< 55	Kurang

Setiap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diantaranya membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2020

Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dan perbandingan terhadap target kinerja Tahun 2019 tertuang dalam tabel dan grafik berikut ini:



Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2019		Capaian (%)	Kategori
				Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	60,00	60,67	101,12	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	75,00	80,94	107,92	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	41,50	53,56	129,06	Sangat Baik
4	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	%	36,40	52,44	144,06	Sangat Baik



Mengacu pada pengukuran kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam Tabel 3.2 dapat dijelaskan sekaitan dengan pencapaian masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Air

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target pada Tahun 2020 sebesar 60,00 Poin. Realisasi IKA Tahun 2020 sebesar 60,67 Poin atau 101,12%. Nilai pada IKA ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengujian kualitas air sungai yang dilakukan di 5 sungai, yaitu Cimandiri, Citarik,



Cikaso, Cimarjung. Cipalabuhan Jumlah titik yang dijadikan sampel pemantauan dan pengujian sebanyak 3 titik untuk setiap sungai. Periode pemantauan/pengujian, yaitu Semester 2 untuk mewakili musim kemarau. Secara keseluruhan titik yang diuji adalah 15 titik. Parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji yaitu, TSS, BOD, COD, DO, Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform.

2. Meningkatnya Kualitas Udara

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target pada Tahun 2020 sebesar 75 Poin. Realisasi IKU Tahun 2020 sebesar 80,94 Poin atau 107,92%. Nilai pada IKU ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengujian kualitas udara ambient yang dilakukan di 4 lokasi yang mewakili sektor perkantoran, perumahan, padat lalu lintas, industri. Jumlah titik yang dijadikan sampel pemantauan dan pengujian sebanyak 4 titik. Periode pemantauan/pengujian, yaitu Semester 2 untuk mewakili musim kemarau. Secara keseluruhan titik yang diuji adalah 4 titik. Parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji yaitu, NO_x dan SO_x.

3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan target pada Tahun 2020 sebesar 41,50 Poin. Realisasi IKTL Tahun 2020 sebesar 53,56 Poin atau 129,06%. Nilai pada IKTL ini merupakan hasil dari pemetaan dan interpretasi citra landsat kondisi tutupan vegetasi (lahan) di Kabupaten Sukabumi.

4. Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Persentase Jumlah Sampah Tertangani dengan target pada Tahun 2020 sebesar 36,40%. Realisasi Tahun 2020 sebesar 52,44% atau 144,06%. Realisasi tersebut merupakan akumulasi dari aktivitas



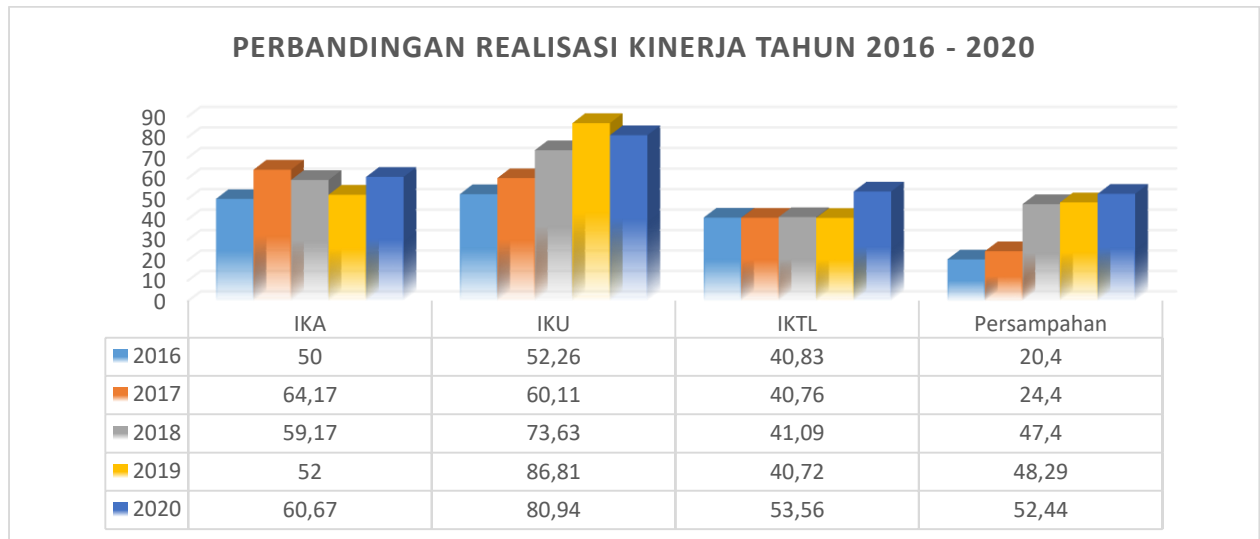
pengurangan sampah perkotaan dan pengangkutan sampah. Tahun 2020 teridentifikasi sebanyak 1036 pengepul, 39 bank sampah dan 3 TPST 3R telah melaksanakan proses daur ulang dengan metode Reuse, Reduse, dan Recycle. Artinya sampah domestik dipilah untuk dimanfaatkan ulang, sisa (residu) yang tidak dapat dimanfaatkan dikirim ke TPA. Peran para pengepul, bank sampah, dan TPST 3R sangat besar dalam mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.

3.1.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dan Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		%	Kategori
				2019	2020		
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	52	60,67	116,67	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	86,81	80,94	93,24	Baik
3	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	poin	40,72	53,56	131,53	Sangat Baik
4	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase jumlah sampah tertangani	%	48,29	52,44	108,59	Sangat Baik



Mengacu pada tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara umum mengalami kenaikan setiap tahun dari Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 terutama pada indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Persampahan. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Air (IKA), pada periode 2016 - 2017 mengalami kenaikan dan pada periode 2017 - 2019 cenderung mengalami penurunan sedangkan pada 2020 kembali mengalami kenaikan. Sementara untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), periode 2016 - 2017 cenderung menurun kinerjanya, meningkat pada periode 2017 - 2018, kembali turun pada 2019 dan pada 2020 mengalami kenaikan yang signifikan.

3.1.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 terhadap target jangka menengah tahun berjalan tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi s.d. tahun 2020	(%)	Kategori
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	60,50	60,67	100,28	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	76	80,94	106,5	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Poin	42	53,56	127,52	Sangat Baik
4	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase jumlah sampah tertangani	%	50,40	52,44	104,05	Sangat Baik



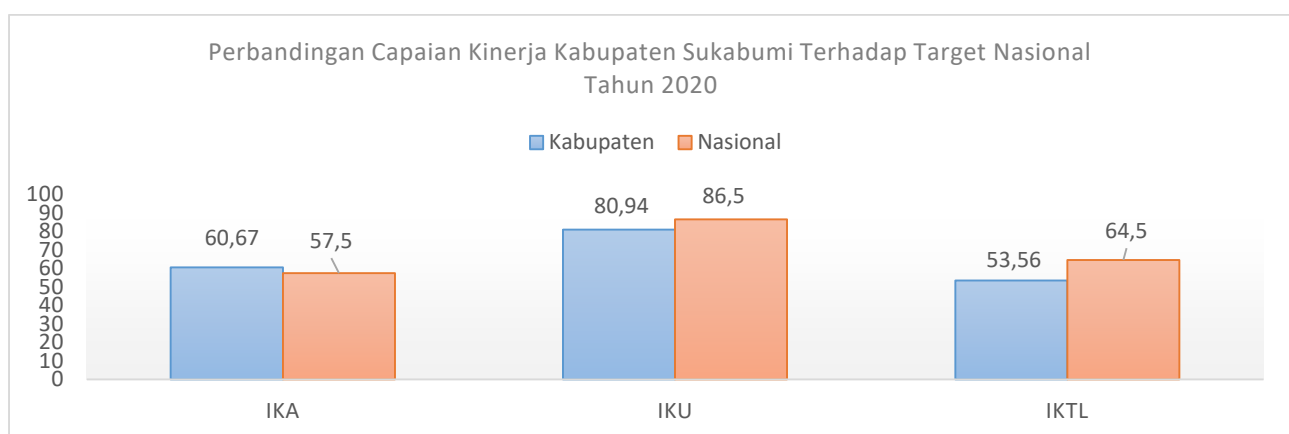
3.1.4. Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target/Capaian Kinerja Nasional

Perbandingan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 terhadap target kinerja nasional tertuang dalam tabel dan grafik berikut ini:

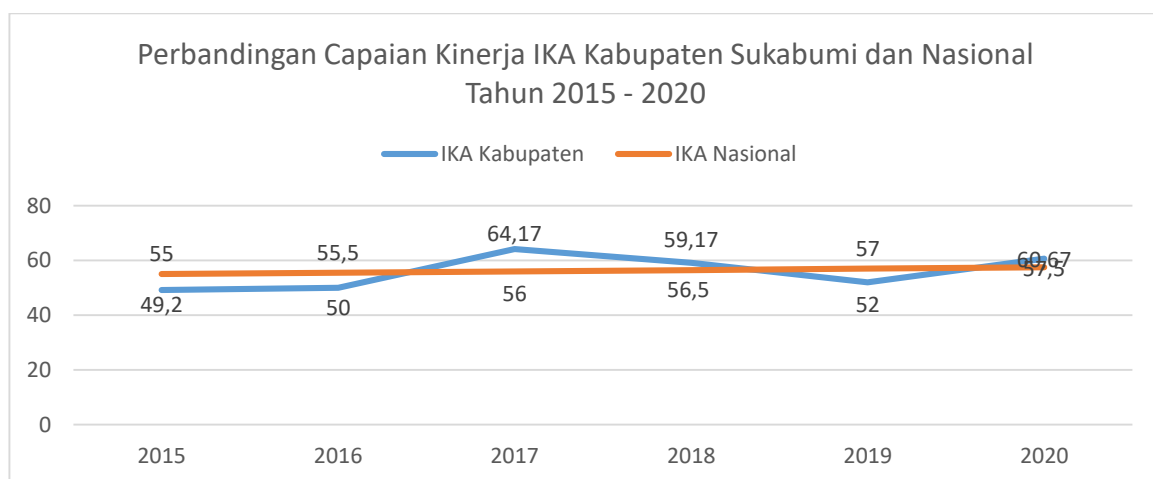


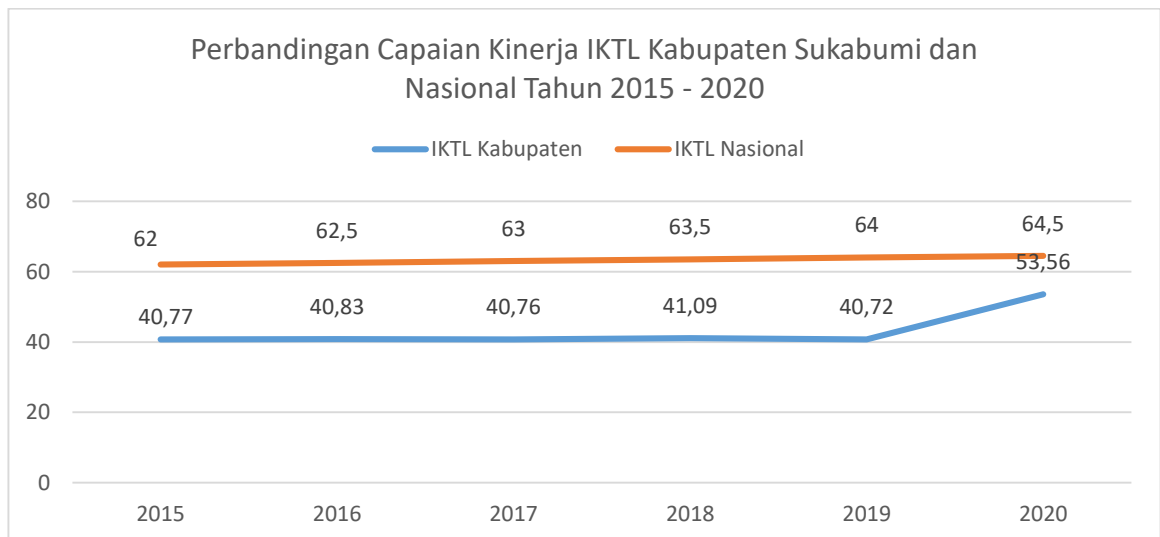
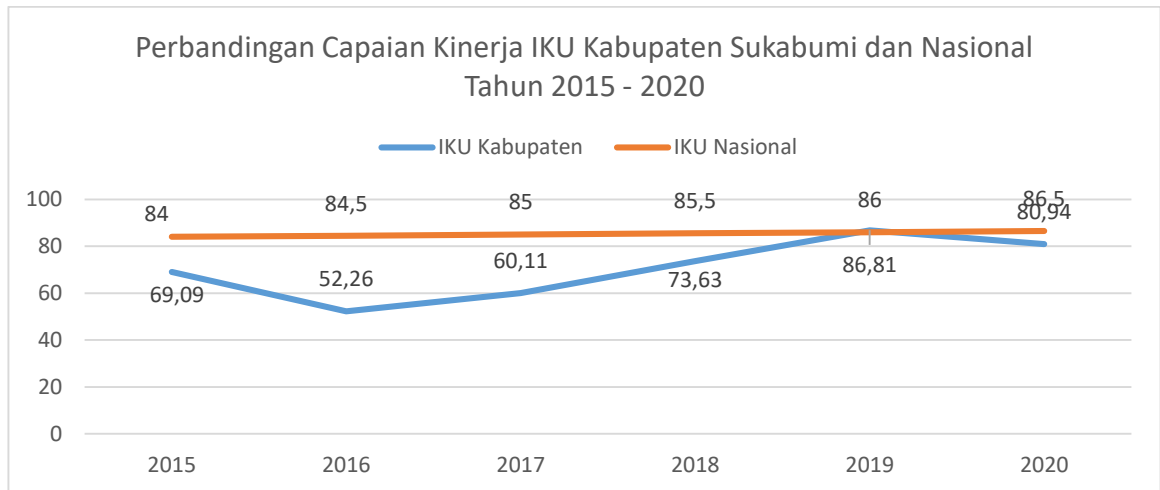
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Sukabumi dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2020		(% Target)	Kategori
			Target Nasional	Realisasi Kabupaten		
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	57,5	60,67	106,45	Sangat Baik
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	86,5	80,94	94,12	Baik
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	64,5	53,56	83,69	Baik



Sementara untuk perbandingan capaian kinerja IKA, IKU, IKTL antara Kabupaten Sukabumi dan Nasional dari Tahun 2015 hingga 2020 tercatat sebagai berikut:





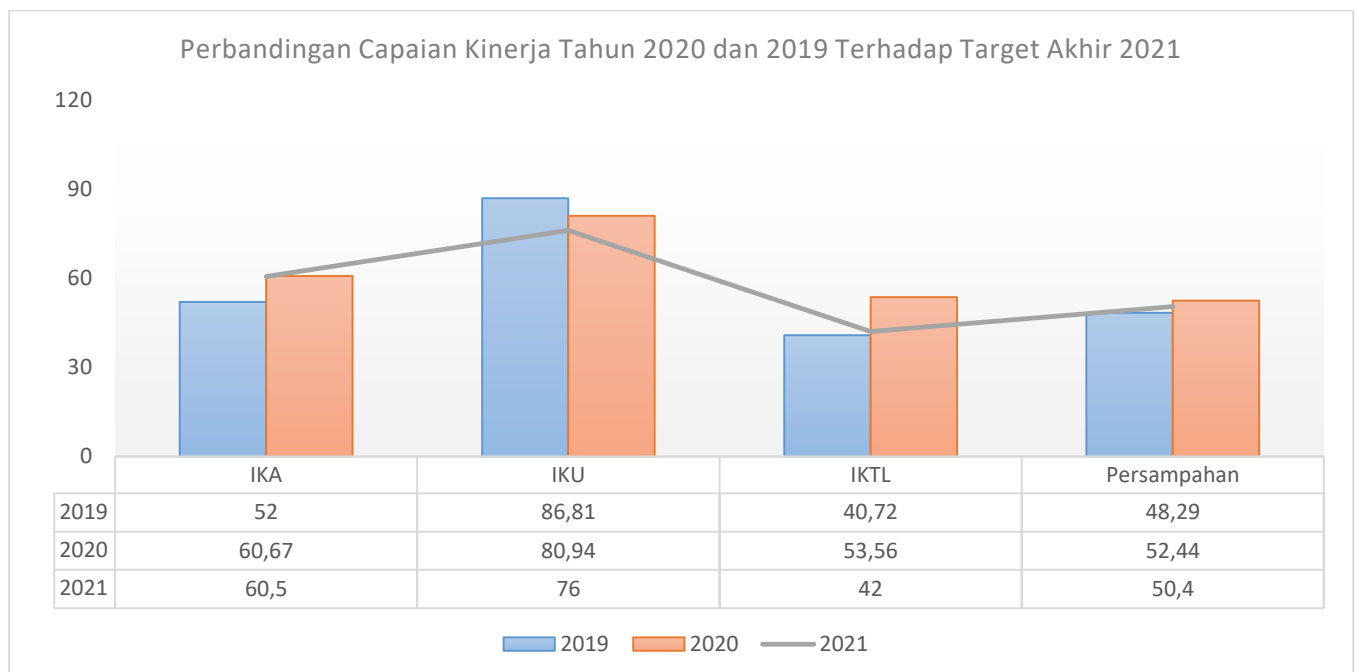
3.1.5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada Tahun 2019 ada yang mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan capaiannya terhadap target yang ditetapkan ada yang melebihi target, ada juga yang tidak mencapai target. Berikut ini tabulasi dari perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan pencapaian terhadap target yang ditetapkan.



Tabel 3.6. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Capaian	%		
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	52	60	60,67	101,12	60,50	100,28
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,81	75	80,94	107,92	76	106,5
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	40,72	41,5	53,56	129,06	42	127,52
4	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	48,29	36,40	52,44	144,06	50,40	104,05



Mengacu pada data tersebut, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran Kinerja : Meningkatkan Kualitas Air
Indikator Kinerja : Indeks Kualitas Air (IKA)



Capaian kinerja IKA Tahun 2020 sebesar 60,67 poin. Capaian ini mengalami penurunan sebanyak 8,67 poin dari Tahun 2019 yang mana capaiannya sebesar 52 poin. Realisasi kinerja IKA Tahun 2020 mencapai 100,28% terhadap target kinerja IKA akhir Renstra yaitu sebesar 60,50 poin. Kenaikan kinerja pada Tahun 2020 terlihat dari jumlah titik pemantauan yang mengalami pencemaran sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH SUNGAI	TITIK PENGUJIAN	STATUS
2018	4	24 Titik	12 Titik Memenuhi Baku Mutu 11 Titik Tercemar Ringan 1 Titik Tercemar Sedang
2019	5	30 Titik	3 Titik Memenuhi Baku Mutu 27 Titik Tercemar Ringan
2020	5	15 Titik	8 Titik Memenuhi Baku Mutu 7 Titik Tercemar Ringan

Mengacu pada hasil identifikasi, terdapat beberapa hal yang di indikasikan menjadi pemicu penurunan kinerja tersebut, seperti perilaku masyarakat dan stakeholders, keterbatasan pengawasan, debit sungai yang menurun terutama musim kemarau, berkurangnya vegetasi di sempadan sungai, pendangkalan sungai, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pengelolaan lingkungan terutama akibat pemotongan anggaran sebagai kontribusi kegiatan jaminan sosial kesehatan.

2. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Kualitas Udara

Indikator Kinerja : Indeks Kualitas Udara (IKU)

Capaian kinerja IKU Tahun 2020 sebesar 80,94 poin. Capaian ini menurun sebanyak 5,87 poin dari Tahun 2019 yang mana capaiannya sebesar 86,81 poin. Realisasi kinerja IKU Tahun 2020 mencapai 106,5% terhadap target kinerja IKU akhir Renstra yaitu sebesar 76 poin.

3. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

Indikator Kinerja : Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Capaian kinerja IKTL Tahun 2020 sebesar 53,56 poin. Capaian ini mengalami kenaikan sebanyak 12,84 poin dari Tahun 2019 yang



mana capaiannya sebesar 40,72 poin. Realisasi kinerja IKTL Tahun 2020 mencapai 127,52% terhadap target kinerja IKTL akhir Renstra yaitu sebesar 42 poin.

4. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Indikator Kinerja : Persentase Jumlah Sampah Tertangani

Capaian kinerja Persentase Jumlah Sampah Tertangani Tahun 2020 sebesar 52,44%. Capaian ini mengalami peningkatan sebanyak 4,15 poin dari Tahun 2019 yang mana capaiannya 48,29%. Realisasi kinerja Persentase Jumlah Sampah Tertangani Tahun 2020 mencapai 104,05% terhadap target kinerja akhir Renstra yaitu sebesar 50,40%.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bila melihat dari realisasi anggaran terhadap pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2020, terjadi efisiensi penggunaan sumber daya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja \geq 100%)	Program	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	101,12 %	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	99,89 %	0,11 %
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	107,92 %			
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	129,06 %	Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	99,04 %	0,96 %
4	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	144,06 %	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	95,85 %	4,15 %

Penyumbang terbesar dari rendahnya penyerapan anggaran akibat adanya kebijakan pusat terkait pemotongan anggaran untuk



penanganan wabah Covid-19, selain itu terdapat beberapa kegiatan yang mengalami kendala dalam penyerapan yang pengerjaannya melalui mekanisme lelang dan pihak ketiga. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap konektivitas rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Namun demikian beberapa indikator kinerja dapat mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2020 tentu tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Akan tetapi dalam perjalanannya terbit kebijakan nasional terkait Refocussing anggaran dalam rangka percepatan penanganan wabah corona virus disease -19 (Covid-19) dan Penyesuaian TKDD PMK No. 35/PMK.07/2020. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah untuk melakukan pengurangan atau anggaran dan penyesuaian rencana kegiatan. Berikut ini program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2020:

Tabel 3.8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air (IKA)	60,67 poin	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun	100%	0 %
			Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	1 dokumen	0 dokumen
				Persentase dokumen evaluasi lingkungan hidup tersusun	100%	66,67 %
			Penyusunan dan Kajian Profil Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen evaluasi lingkungan hidup	3 dokumen	2 dokumen
				Persentase penerapan dokumen lingkungan usaha/kegiatan	100%	110 %
	Pembinaan Teknis Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL	Jumlah dokumen lingkungan usaha/kegiatan yang dikelola	100 rektek	110 rektek		



Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
				Persentase air sesuai baku mutu pada 15 titik (5 sungai)	47 %	53 %
			Pemantauan Kualitas Air	Jumlah lokasi/titik pemantauan kualitas air sungai	15 titik (5 sungai)	15 titik (5 sungai)
			Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan			
			Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan Tahun 2020)	Sarana prasarana pengujian kualitas air	6 unit/set	0 unit/set
			Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah dokumen identifikasi sumber pencemaran air sungai	1 dokumen	0 dokumen
				Persentase usaha/kegiatan mengelola B3 dan limbah B3	100 %	290 %
			Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan mengelola B3 dan limbah B3	10 usaha/kegiatan	29 usaha/kegiatan
				Persentase ketaatan usaha/kegiatan	50 %	62,5 %
			Pengawasan Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	50 usaha/kegiatan	104 usaha/kegiatan
			Penerapan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Jumlah usaha/kegiatan taat terhadap hukum lingkungan	40 usaha/kegiatan	64 usaha/kegiatan
				Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan	100 %	100 %
			Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan	Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang ditangani	30 pengaduan	30 pengaduan
Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara (IKU)	80,94 poin	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Persentase udara sesuai baku mutu pada 10 titik	100 %	95 %
			Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Wilayah Kabupaten Sukabumi	Jumlah lokasi/titik pemantauan kualitas udara ambien	10 titik	10 titik
			Pengendalian Pencemaran Udara	Jumlah dokumen identifikasi sumber pencemaran udara ambien	1 dokumen	0
				Cakupan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	100 %	22 %
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	587 orang	0
			Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan dan Stakeholders			
			Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)	Jumlah sekolah berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan	9 sekolah	4 sekolah
Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan	53,56 poin	Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase dokumen perencanaan pemeliharaan lingkungan	100 %	0 %



Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	
	lahan (IKTL)		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sukabumi	Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan lingkungan	1 dokumen	0 dokumen	
			Pengelolaan Pesisir Terpadu		Persentase lokasi kampung iklim	100 %	0 %
			Program Kampung Iklim di Level Daerah	Jumlah lokasi kampung iklim	5 kp/dusun	0 kp/dusun	
					Persentase tingkat tutupan vegetasi	21 %	34 %
				Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Jumlah data kerusakan lingkungan	35 kecamatan	10 kecamatan
Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase jumlah sampah tertangani	52,44%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah dan Drainase	Persentase pengurangan sampah perkotaan	12 %	28,72 %	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah	381 orang	0	
			Penilaian K3				
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan				
			Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh (Adipura)				
				Persentase pengangkutan sampah	24,4 %	23,72 %	
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah sampah terangkut	510 m3	496 m3	
				Jumlah sarana dan prasarana angkutan sampah	64 unit	73 unit	
				Jumlah sarana dan prasarana sampah yang dipelihara	64 unit	73 unit	
				Persentase pengoperasian TPA	40 %	70 %	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola	761 m3	1096,59 m3	
				Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	205 unit	131 unit	
				Jumlah TPA dengan Control Landfill	2 lokasi	2 lokasi	

3.2. Realisasi Anggaran

Belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja. Anggaran yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup berasal dari



APBD dan APBN. Gambaran penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	485.216.000	1.968.864.220	86.71
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.945.000	753.805.968	94.58
3	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	286.690.000	656.677.925	99.95
4	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	21.108.910.300	15.364.463.600	70.46

Pencapaian sasaran tersebut dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam, serta Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase. Berikut ini dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis Tahun 2020:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini mengakomodir 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran Tahun 2020. Pagu anggaran sebesar Rp. 566.161.000,-, terealisasi sebesar Rp. 565.511.045,- atau 99,89%. Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1. Meningkatnya Kualitas Air 2. Meningkatnya Kualitas Udara			
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	566.161.000	565.511.045	99,89%
Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan	52.010.000	51.960.000	99,90
Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Izin	36.630.000	36.630.000	100



Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
Lingkungan dan Izin PPLH			
Penerapan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	32.450.000	32.450.000	100
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan Tahun 2020)	0	0	0
Pengendalian Pencemaran Air	11.220.000	11.220.000	100
Pemantauan Kualitas Air	99.865.000	99.855.000	99,99
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	223.331.000	222.741.045	99,74
Pembinaan Teknis Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL	22.240.000	22.240.000	100
Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah B3	2.770.000	2.770.000	100
Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	4.700.000	4.700.000	100
Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh/Adipura	0	0	0
Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)	25.720.000	25.720.000	100
Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan Hidup dan Stakeholders	0	0	0
Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Wilayah Kab. Sukabumi	50.725.000	50.725.000	100
Pengendalian Pencemaran Udara	4.500.000	4.500.000	100

2. Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini mengakomodir 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2020. Pagu anggaran sebesar Rp. 286.690.000,-, terealisasi sebesar Rp. 283.925.000,- atau 99,04%. Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan			
Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	286.690.000	283.925.000	99,04
Penyusunan dan Kajian Profil Lingkungan Hidup	220.000.000	218.355.000	99,25
Program Kampung Iklim di Level Daerah	34.020.000	34.020.000	100
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sukabumi	2.740.000	1.900.000	69,34
Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	9.120.000	9.120.000	100



Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
Pengelolaan Pesisir Terpadu	20.810.000	20.530.000	98,65

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase

Program ini mengakomodir 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Tahun 2020. Pagu anggaran sebesar Rp. 21.805.436.000,-, terealisasi sebesar Rp. 20.233.041.900,- atau 95,85%. Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman			
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	21.108.910.300	20.233.041.900	95,85
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3.070.000	3.070.000	100
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.245.720.000	1.214.548.000	97,50
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	14.247.051.300	13.402.354.900	94,07
Penilaian K3	0	0	0
Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan	0	0	0
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan (Hutang Tahun 2019)	1.160.412.000	1.160.412.000	100
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Hutang Tahun 2019)	4.452.657.000	4.452.657.000	100

BAB IV

PENUTUP



Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi seperti dijabarkan dalam uraian terdahulu mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, mulai dari keindahan alam, keanekaragaman hayati, potensi dan sumberdaya alam yang ada. Namun semua itu tidak selamanya baik, ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi tidak diperlakukan secara arif dan bijaksana, berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dihadapkan dengan kompleksitas (*Complexibility*) masalah yang timbul dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

1. Sarana dan prasarana dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup yang belum memadai dibanding luasnya pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan (berkelanjutan)
3. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sepenuhnya belum terkendali
4. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih cukup rendah.

Adapun solusi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi



2. Menyelaraskan dan mengintegrasikan kajian-kajian pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan, menerapkan teknologi tepat guna lingkungan, menyusun panduan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, penataan dan penegakan hukum lingkungan serta menyusun peraturan pelaksana bidang hukum lingkungan
5. Membina kader lingkungan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh pada masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.

Melihat permasalahan di atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat memposisikan diri sebagai lembaga yang dipercaya dan mampu merespon masalah - masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat, dengan demikian secara internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi perlu mengusahakan budaya kerja yang cepat tanggap (*responsive*) dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dapat memenuhi target pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kabupaten Sukabumi dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang di ukur melalui perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat



disimpulkan bahwa pencapaian kinerja memenuhi bahkan melebihi target pencapaian kinerja sebesar **63,91 Poin** dari target sebesar **57,10 Poin** atau **111,92%** sehingga untuk keberhasilan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dikategorikan “**Sangat Baik**“ (> 100 %).

Komitmen pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 mendapat apresiasi baik dari Provinsi Jawa Barat, dengan diraihnya beberapa penghargaan yaitu:

1. Piagam Penghargaan Raksa Prasada Kategori Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tahun 2020 dari Gubernur Jawa Barat diberikan kepada:
 - a. SDN 1 Cimanggu Cikembar
 - b. SMPN 1 Ciracap
 - c. SMPN 1 Jampang Tengah
2. Piagam Penghargaan Raksa Prasada Kategori Pembina Sekolah Berbudaya Lingkungan Tahun 2020 dari Gubernur Jawa Barat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKIP PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 ini dibuat untuk dijadikan acuan/pedoman didalam mewujudkan kinerja yang baik pada masa mendatang.

Palabuhanratu, Desember 2020

Kepala Dinas,

Ir. Hj. DEDAH HERLINA, M.Si
NIP. 19630711 198809 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427
E-mail: blh@sukabumikab.go.id Website: <http://sukabumikab.go.id>
Palabuhanratu Sukabumi 43164

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 660.1/ -DLH/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup, maka perlu adanya dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 265 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara periodik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 seri A);

16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
24. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020
- KEDUA :** Susunan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--|
| PENGARAH | : KEPALA DLH |
| PENANGGUNGJAWAB | : SEKRETARIS DLH |
| KETUA | : SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM |
| SEKRETARIS | : SUB BAGIAN KEUANGAN |
| ANGGOTA | : 1. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM |
| | 2. BIDANG TATA LINGKUNGAN |
| | 3. BIDANG PENGENDALIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN |
| | 4. BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN |
| | 5. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN |

- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020.
 - b. Melaksanakan penyusunan, pengkoreksian dan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020.
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- KEEMPAT** : Teknis pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diatur lebih lanjut oleh KETUA.
- KELIMA** : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada tanggal : Desember 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

Ir. Hj. DEDAH HERLINA, M.Si
NIP. 19630711 198809 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	2.131.500.000,00	2.184.603.500,00	53.103.500,00	102,49	Perda Nomor 6 Tahun 2013
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.131.500.000,00	2.184.603.500,00	53.103.500,00	102,49	
4 . 1 . 00 . 00 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.131.500.000,00	2.184.603.500,00	53.103.500,00	102,49	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.984.500.000,00	2.000.980.000,00	16.480.000,00	100,83	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.984.500.000,00	2.000.980.000,00	16.480.000,00	100,83	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	147.000.000,00	183.623.500,00	36.623.500,00	124,91	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	147.000.000,00	183.623.500,00	36.623.500,00	124,91	
5	BELANJA	36.885.305.311,00	35.820.592.877,00	(1.064.712.434,00)	97,11	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.441.830.216,00	10.389.566.848,00	(52.263.368,00)	99,50	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	Belanja Pegawai	10.441.830.216,00	10.389.566.848,00	(52.263.368,00)	99,50	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	5.422.711.368,00	5.397.426.311,00	(25.285.057,00)	99,53	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.231.797.216,00	4.212.533.360,00	(19.263.856,00)	99,54	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	472.592.130,00	470.054.030,00	(2.538.100,00)	99,46	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	219.439.200,00	218.825.000,00	(614.200,00)	99,72	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	5.340.000,00	5.320.000,00	(20.000,00)	99,63	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	183.900.400,00	182.850.000,00	(1.050.400,00)	99,43	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	267.076.270,00	265.419.300,00	(1.656.970,00)	99,38	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.840.478,00	7.829.732,00	(10.746,00)	99,86	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	64.874,00	63.586,00	(1.288,00)	98,01	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	8.665.252,00	8.632.880,00	(32.372,00)	99,63	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kematian	25.995.548,00	25.898.423,00	(97.125,00)	99,63	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	5.019.118.848,00	4.992.140.537,00	(26.978.311,00)	99,46	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.390.740.067,00	4.362.662.920,00	(28.077.147,00)	99,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00.00.1.02.06	Tunjangan Kinerja Dinamis	402.541.909,00	402.541.909,00	0,00	100,00	
5.1.00.00.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	225.836.872,00	226.935.708,00	1.098.836,00	100,49	
5.2	BELANJA LANGSUNG	26.443.475.095,00	25.431.026.029,00	(1.012.449.066,00)	96,17	
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.730.481.700,00	3.600.794.568,00	(129.687.132,00)	96,52	
5.2.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.730.481.700,00	3.600.794.568,00	(129.687.132,00)	96,52	
5.2.01.01.2	Belanja Barang dan Jasa	3.730.481.700,00	3.600.794.568,00	(129.687.132,00)	96,52	
5.2.01.01.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.613.000,00	171.200.800,00	(1.412.200,00)	99,18	
5.2.01.01.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.827.800,00	63.422.800,00	(405.000,00)	99,37	
5.2.01.01.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.511.000,00	11.394.000,00	(117.000,00)	98,98	
5.2.01.01.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	88.099.200,00	87.209.000,00	(890.200,00)	98,99	
5.2.01.01.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	7.735.000,00	7.735.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.2.02	Belanja Bahan/Material	173.525.000,00	171.683.000,00	(1.842.000,00)	98,94	
5.2.01.01.2.02.12	Belanja Bahan APD	173.525.000,00	171.683.000,00	(1.842.000,00)	98,94	
5.2.01.01.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.956.450.000,00	2.894.819.242,00	(61.630.758,00)	97,92	
5.2.01.01.2.03.01	Belanja Telepon	1.440.000,00	1.414.908,00	(25.092,00)	98,26	
5.2.01.01.2.03.02	Belanja Air	31.800.000,00	25.519.040,00	(6.280.960,00)	80,25	
5.2.01.01.2.03.03	Belanja Listrik	76.600.000,00	69.041.810,00	(7.558.190,00)	90,13	
5.2.01.01.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	17.780.000,00	(220.000,00)	98,78	
5.2.01.01.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	48.900.000,00	46.994.739,00	(1.905.261,00)	96,10	
5.2.01.01.2.03.18	Belanja Jasa Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.2.03.27	Belanja Jasa Pembuatan Tulisan di Media Massa	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.2.03.38	Belanja Jasa Non PNS	2.768.460.000,00	2.722.818.745,00	(45.641.255,00)	98,35	
5.2.01.01.2.04	Belanja Premi Asuransi	164.160.000,00	158.379.226,00	(5.780.774,00)	96,48	
5.2.01.01.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	164.160.000,00	158.379.226,00	(5.780.774,00)	96,48	
5.2.01.01.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.743.400,00	62.314.000,00	(429.400,00)	99,32	
5.2.01.01.2.06.01	Belanja Cetak	52.095.400,00	51.666.000,00	(429.400,00)	99,18	
5.2.01.01.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.948.000,00	4.948.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.505.000,00	19.505.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.01.01.2.13	Belanja Pakaian Kerja	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	0,00	
5.2.01.01.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	0,00	
5.2.01.01.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.585.300,00	120.493.300,00	(1.092.000,00)	99,10	
5.2.01.01.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.637.000,00	102.595.000,00	(42.000,00)	99,96	
5.2.01.01.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.948.300,00	17.898.300,00	(1.050.000,00)	94,46	
5.2.01.01.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.01.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	686.152.095,00	682.673.516,00	(3.478.579,00)	99,49	
5.2.02.03	Pengadaan Mebeulair	27.305.000,00	26.950.000,00	(355.000,00)	98,70	
5.2.02.03.3	Belanja Modal	27.305.000,00	26.950.000,00	(355.000,00)	98,70	
5.2.02.03.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	19.305.000,00	19.050.000,00	(255.000,00)	98,68	
5.2.02.03.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19.305.000,00	19.050.000,00	(255.000,00)	98,68	
5.2.02.03.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75	
5.2.02.03.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75	
5.2.02.05	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.757.945,00	83.330.000,00	(427.945,00)	99,49	
5.2.02.05.3	Belanja Modal	83.757.945,00	83.330.000,00	(427.945,00)	99,49	
5.2.02.05.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.750.000,00	11.733.000,00	(17.000,00)	99,86	
5.2.02.05.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.05.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.750.000,00	11.733.000,00	(17.000,00)	99,86	
5.2.02.05.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	67.807.945,00	67.397.000,00	(410.945,00)	99,39	
5.2.02.05.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	27.097.945,00	27.097.000,00	(945,00)	100,00	
5.2.02.05.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	40.710.000,00	40.300.000,00	(410.000,00)	98,99	
5.2.02.05.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.05.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.08	Pengadaan Perangkat Komputer	60.500.000,00	59.755.000,00	(745.000,00)	98,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.08.3	Belanja Modal	60.500.000,00	59.755.000,00	(745.000,00)	98,77	
5.2.02.08.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.500.000,00	59.755.000,00	(745.000,00)	98,77	
5.2.02.08.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.500.000,00	59.755.000,00	(745.000,00)	98,77	
5.2.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.15.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.15.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.15.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.17.2	Belanja Barang dan Jasa	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.17.2.20	Belanja Pemeliharaan	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.17.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	63.850.000,00	63.850.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman	24.339.150,00	24.339.150,00	0,00	100,00	
5.2.02.19.2	Belanja Barang dan Jasa	24.339.150,00	24.339.150,00	0,00	100,00	
5.2.02.19.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.339.150,00	24.339.150,00	0,00	100,00	
5.2.02.19.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor	24.339.150,00	24.339.150,00	0,00	100,00	
5.2.02.19.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	411.400.000,00	409.449.366,00	(1.950.634,00)	99,53	
5.2.02.21.2	Belanja Barang dan Jasa	411.400.000,00	409.449.366,00	(1.950.634,00)	99,53	
5.2.02.21.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	296.400.000,00	294.633.000,00	(1.767.000,00)	99,40	
5.2.02.21.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	296.400.000,00	294.633.000,00	(1.767.000,00)	99,40	
5.2.02.21.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	115.000.000,00	114.816.366,00	(183.634,00)	99,84	
5.2.02.21.2.05.01	Belanja Jasa Service	95.000.000,00	94.982.966,00	(17.034,00)	99,98	
5.2.02.21.2.05.09	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	19.833.400,00	(166.600,00)	99,17	
5.2.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.22.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.22.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.02.22.2.20.28	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65.080.000,00	65.080.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja</i>	10.280.000,00	10.280.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.06.01.1	Belanja Pegawai	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.01.1.02	Honorarium Non PNS	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.01.1.02.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.01.2	Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.01.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.01.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.01.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.01.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.01.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.01.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.01.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.01.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.01.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.01.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.01.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.02	Honorarium Non PNS	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.1.02.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.02.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.02.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.560.000,00	18.560.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.03.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.03.1.02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.06.03.1.02.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.03.2	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.03.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.03.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.03.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.03.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.03.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.05	Penyusunan Laporan Keuangan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.1	Belanja Pegawai	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.1.02	Honorarium Non PNS	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.1.02.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.2	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.05.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.05.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.05.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.05.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.08	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.08.1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.08.1.02	Honorarium Non PNS	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.08.1.02.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.08.2	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.08.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.08.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.08.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.08.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.08.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
5.2.06.08.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06.08.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	21.108.910.300,00	20.233.041.900,00	(875.868.400,00)	95,85	
5.2.85.04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.85.04.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.1.01.11	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.1.02.04	Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.2	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.04.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.04.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.04.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	1.245.720.000,00	1.214.548.000,00	(31.172.000,00)	97,50	
5.2.85.05.2	Belanja Barang dan Jasa	361.980.000,00	358.068.000,00	(3.912.000,00)	98,92	
5.2.85.05.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000.000,00	173.195.000,00	(1.805.000,00)	98,97	
5.2.85.05.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	175.000.000,00	173.195.000,00	(1.805.000,00)	98,97	
5.2.85.05.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.980.000,00	6.970.000,00	(10.000,00)	99,86	
5.2.85.05.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.980.000,00	4.970.000,00	(10.000,00)	99,80	
5.2.85.05.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.05.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	170.000.000,00	168.223.000,00	(1.777.000,00)	98,95	
5.2.85.05.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	170.000.000,00	168.223.000,00	(1.777.000,00)	98,95	
5.2.85.05.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.2.23	Belanja Hibah Barang atau Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.2.23.02	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.85.05.2.28	Pemeliharaan/Peningkatan Infrastruktur Pedesaan, Pertanian, Lingkungan, Pemukiman, Fasum dan Fasos	10.000.000,00	9.680.000,00	(320.000,00)	96,80	
5.2.85.05.2.28.11	Belanja Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Kebersihan	10.000.000,00	9.680.000,00	(320.000,00)	96,80	
5.2.85.05.3	Belanja Modal	883.740.000,00	856.480.000,00	(27.260.000,00)	96,92	
5.2.85.05.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.3.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	105.000.000,00	104.280.000,00	(720.000,00)	99,31	
5.2.85.05.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	105.000.000,00	104.280.000,00	(720.000,00)	99,31	
5.2.85.05.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.05.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	778.740.000,00	752.200.000,00	(26.540.000,00)	96,59	
5.2.85.05.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	778.740.000,00	752.200.000,00	(26.540.000,00)	96,59	
5.2.85.06	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	14.247.051.300,00	13.402.354.900,00	(844.696.400,00)	94,07	
5.2.85.06.1	Belanja Pegawai	5.835.620.000,00	5.781.000.000,00	(54.620.000,00)	99,06	
5.2.85.06.1.02	Honorarium Non PNS	5.817.620.000,00	5.770.000.000,00	(47.620.000,00)	99,18	
5.2.85.06.1.02.07	Honorarium Tenaga Harian Lepas	5.817.620.000,00	5.770.000.000,00	(47.620.000,00)	99,18	
5.2.85.06.1.03	Uang Lembur	18.000.000,00	11.000.000,00	(7.000.000,00)	61,11	
5.2.85.06.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.000.000,00	11.000.000,00	(7.000.000,00)	61,11	
5.2.85.06.2	Belanja Barang dan Jasa	8.411.431.300,00	7.621.354.900,00	(790.076.400,00)	90,61	
5.2.85.06.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.774.500.000,00	3.590.599.100,00	(183.900.900,00)	95,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.85.06.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	75.000.000,00	74.250.000,00	(750.000,00)	99,00	
5.2.85.06.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.652.000.000,00	3.468.849.100,00	(183.150.900,00)	94,98	
5.2.85.06.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.06.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
5.2.85.06.2.02.09	Belanja Bahan Pupuk Organik	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
5.2.85.06.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.740.864.000,00	2.674.947.800,00	(65.916.200,00)	97,60	
5.2.85.06.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.158.967.000,00	2.105.334.000,00	(53.633.000,00)	97,52	
5.2.85.06.2.05.03	Belanja Pelumas	396.897.000,00	384.979.000,00	(11.918.000,00)	97,00	
5.2.85.06.2.05.09	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	185.000.000,00	184.634.800,00	(365.200,00)	99,80	
5.2.85.06.2.13	Belanja Pakaian Kerja	47.125.000,00	0,00	(47.125.000,00)	0,00	
5.2.85.06.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja	47.125.000,00	0,00	(47.125.000,00)	0,00	
5.2.85.06.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.320.000,00	25.300.000,00	(20.000,00)	99,92	
5.2.85.06.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.820.000,00	20.800.000,00	(20.000,00)	99,90	
5.2.85.06.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.06.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.773.622.300,00	1.281.008.000,00	(492.614.300,00)	72,23	
5.2.85.06.2.20.34	Belanja Pemeliharaan Sarana Kebersihan	1.773.622.300,00	1.281.008.000,00	(492.614.300,00)	72,23	
5.2.85.07	Penilaian K3	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.02.07	Belanja Pandel, Piala, Piagam, Cenderamata	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.85.07.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.33	Belanja Bonus/Reward/Penghargaan/Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.07.2.33.01	Belanja Bonus/Reward/Penghargaan/Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09	Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.1.02.04	Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.09.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.85.13	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan (Hutang Tahun 2019)	1.160.412.000,00	1.160.412.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.13.2	Belanja Barang dan Jasa	1.160.412.000,00	1.160.412.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.13.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	577.412.000,00	577.412.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.13.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	577.412.000,00	577.412.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.13.2.20	Belanja Pemeliharaan	583.000.000,00	583.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.13.2.20.34	Belanja Pemeliharaan Sarana Kebersihan	583.000.000,00	583.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Hutang Tahun 2019)	4.452.657.000,00	4.452.657.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.2	Belanja Barang dan Jasa	804.264.000,00	804.264.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.85.14.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.604.000,00	505.604.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	505.604.000,00	505.604.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.2.02	Belanja Bahan/Material	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.2.02.34	Belanja Sarana Pengolahan Limbah	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.2.28	Pemeliharaan/Peningkatan Infrastruktur Pedesaan, Pertanian, Lingkungan, Pemukiman, Fasum dan Fasos	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.2.28.11	Belanja Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Kebersihan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3	Belanja Modal	3.648.393.000,00	3.648.393.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.568.000.000,00	2.568.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.568.000.000,00	2.568.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	104.280.000,00	104.280.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	104.280.000,00	104.280.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	59.004.000,00	59.004.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.22.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	59.004.000,00	59.004.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	319.709.000,00	319.709.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	319.709.000,00	319.709.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	465.400.000,00	465.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.85.14.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	296.400.000,00	296.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.91	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	566.161.000,00	565.511.045,00	(649.955,00)	99,89	
5.2.91.01	Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan	52.010.000,00	51.960.000,00	(50.000,00)	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.91.01.1	Belanja Pegawai	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.1.02	Honorarium Non PNS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.2	Belanja Barang dan Jasa	50.330.000,00	50.280.000,00	(50.000,00)	99,90	
5.2.91.01.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.01.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.580.000,00	29.530.000,00	(50.000,00)	99,83	
5.2.91.01.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.980.000,00	18.930.000,00	(50.000,00)	99,74	
5.2.91.01.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03	Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)	25.720.000,00	25.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2	Belanja Barang dan Jasa	25.720.000,00	25.720.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.03.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.03.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2.02.07	Belanja Pandel, Piala, Piagam, Cenderamata	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.03.2.02.18	Belanja Bahan Kesehatan Lingkungan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.91.03.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.03.2.33	Belanja Bonus/Reward/Penghargaan/Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.03.2.33.01	Belanja Bonus/Reward/Penghargaan/Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04	Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan Hidup dan Stakeholders	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.1.02.04	Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.02.07	Belanja Pandel, Piala, Piagam, Cenderamata	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.13.02	Belanja Kaos/T-Shirt	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.33	Belanja Bonus/Reward/Penghargaan/Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.04.2.33.01	Belanja Bonus/Reward/Penghargaan/Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05	Pengendalian Pencemaran Air	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.05.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.1.02.04	Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.91.05.2	Belanja Barang dan Jasa	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.05.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.01.13	Belanja KIT Pelatihan/Perengkanan Rapat, Sosialisasi, Bintek dan Kursus	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.05.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.05.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.05.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.29.01	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.05.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.06	Pemantauan Kualitas Air	99.865.000,00	99.855.000,00	(10.000,00)	99,99	
5.2.91.06.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.06.1.02	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.06.1.02.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.06.2	Belanja Barang dan Jasa	93.565.000,00	93.555.000,00	(10.000,00)	99,99	
5.2.91.06.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.06.2.03.13	Belanja Jasa Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.06.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.06.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.06.2.13	Belanja Pakaian Kerja	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.06.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.06.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.990.000,00	28.980.000,00	(10.000,00)	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.91.06.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.990.000,00	21.980.000,00	(10.000,00)	99,95	
5.2.91.06.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.06.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	24.475.000,00	24.475.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.06.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24.475.000,00	24.475.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	223.331.000,00	222.741.045,00	(589.955,00)	99,74	
5.2.91.07.2	Belanja Barang dan Jasa	223.331.000,00	222.741.045,00	(589.955,00)	99,74	
5.2.91.07.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.01.17	Belanja Alat Habis Pakai Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.02	Belanja Bahan/Material	125.300.000,00	124.710.045,00	(589.955,00)	99,53	
5.2.91.07.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	120.000.000,00	119.436.500,00	(563.500,00)	99,53	
5.2.91.07.2.02.12	Belanja Bahan APD	5.300.000,00	5.273.545,00	(26.455,00)	99,50	
5.2.91.07.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.03.08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	516.000,00	516.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.06.02	Belanja Penggandaan	516.000,00	516.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.340.000,00	18.340.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.840.000,00	14.840.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.07.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.07.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.07.3.42.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.91.08	Pengendalian Pencemaran Udara	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.08.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.08.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.08.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.08.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.08.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.09	Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Wilayah Kabupaten Sukabumi	50.725.000,00	50.725.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.09.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.09.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.09.1.02.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.09.2	Belanja Barang dan Jasa	46.525.000,00	46.525.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.09.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.09.2.03.13	Belanja Jasa Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.09.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.09.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.09.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.09.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.09.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.09.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	24.525.000,00	24.525.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.09.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24.525.000,00	24.525.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.91.10	Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh/Adipura	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.1.02.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.10.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11	Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah B3	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.11.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.11.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.91.11.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.11.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.11.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.11.2.29.01	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12	Pembinaan Teknis AMDAL, UKL-UPL, SPPL	22.240.000,00	22.240.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.12.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.2	Belanja Barang dan Jasa	22.240.000,00	22.240.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.12.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.240.000,00	22.240.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.12.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.640.000,00	15.640.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.12.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.12.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.12.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.13	Pengawasan Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	36.630.000,00	36.630.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.1	Belanja Pegawai	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.1.02	Honorarium Non PNS	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.1.02.04	Uang Saku	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.1.02.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.13.2	Belanja Barang dan Jasa	29.470.000,00	29.470.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.91.13.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.13.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.13.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14	Penerapan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.1.02.04	Uang Saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.1.02.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.14.2	Belanja Barang dan Jasa	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.14.2.02.07	Belanja Pandel, Piala, Piagam, Cenderamata	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.14.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.06.02	Belanja Peggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.14.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.14.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.91.14.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.14.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.15	Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.15.2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.15.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.15.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.15.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.15.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.15.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
5.2.91.15.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.15.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.17	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan Tahun 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.17.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.17.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.17.3.42.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.91.17.3.42.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92	Program Perlindungan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	286.690.000,00	283.925.000,00	(2.765.000,00)	99,04	
5.2.92.01	Penyusunan dan kajian Profil Lingkungan Hidup	220.000.000,00	218.355.000,00	(1.645.000,00)	99,25	
5.2.92.01.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.01.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.01.1.02.09	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.01.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	218.355.000,00	(1.645.000,00)	99,25	
5.2.92.01.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.01.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.01.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.01.2.06.01	Belanja Cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.01.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.01.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.92.01.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.01.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.01.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.01.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.01.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.01.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.01.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.01.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	125.000.000,00	123.355.000,00	(1.645.000,00)	98,68	
5.2.92.01.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	125.000.000,00	123.355.000,00	(1.645.000,00)	98,68	
5.2.92.01.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.050.000,00	56.050.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.01.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	56.050.000,00	56.050.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02	Program Kampung Iklim di Level Daerah	34.020.000,00	34.020.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.1.02	Honorarium Non PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.1.02.04	Uang Saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2	Belanja Barang dan Jasa	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.02.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.02.2.29.01	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.92.02.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.04	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sukabumi	2.740.000,00	1.900.000,00	(840.000,00)	69,34	
5.2.92.04.1	Belanja Pegawai	840.000,00	0,00	(840.000,00)	0,00	
5.2.92.04.1.02	Honorarium Non PNS	840.000,00	0,00	(840.000,00)	0,00	
5.2.92.04.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840.000,00	0,00	(840.000,00)	0,00	
5.2.92.04.1.02.04	Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.04.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.01.13	Belanja KIT Pelatihan/Perengkanan Rapat, Sosialisasi, BinteK dan Kursus	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.04.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.04.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.29.01	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.04.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.05	Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Alam (Lingkungan)	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.05.2	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.05.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.05.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.05.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.05.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.05.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.92.06	Pengelolaan Pesisir Terpadu	20.810.000,00	20.530.000,00	(280.000,00)	98,65	
5.2.92.06.1	Belanja Pegawai	2.060.000,00	1.780.000,00	(280.000,00)	86,41	
5.2.92.06.1.02	Honorarium Non PNS	2.060.000,00	1.780.000,00	(280.000,00)	86,41	
5.2.92.06.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	560.000,00	280.000,00	(280.000,00)	50,00	
5.2.92.06.1.02.04	Uang Saku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.01.10	Belanja Dekorasi/Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.06.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.06.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.06.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan/Hotel	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Panitia/Tim Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.06.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.06.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.92.06.2.29	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.29.01	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
5.2.92.06.2.29.02	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.753.805.311,00)	(33.635.989.377,00)	1.117.815.934,00	96,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Palabuhanratu, 31 Desember 2020
Kepala Dinas

Ir. Hj. Dedah Herlina, M.Si
NIP. 19630711 198809 2 001